



**LAPORAN KINERJA (LKj IP)  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk implementasi dari akuntabilitas pelaksanaan tugas wewenang Pemerintah kota padang Panjang kepada Pemerintah tingkat atas, sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara legalitas formal, penyusunan dan penyampaian LKj IP ini adalah dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana mewajibkan setiap Kepala SKPD untuk menyampaikan kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, maka dalam laporan ini disajikan indikator-indikator yang ditetapkan di dalam penetapan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, terutama yang menyangkut dengan pelaksanaan kinerja Dinas pangan dan pertanian sebagaimana yang diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian penyusunan LKj IP ini kami sampaikan apresiasi yang tinggi dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi maksud dan bermanfaat adanya.

Padang Panjang, Januari 2020

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Kota Padang Panjang



**ADE NAFRITA ANAS, SP.,MP**

Pembina Tk. I, NIP. 19710520 199903 2 004

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk implementasi dari akuntabilitas pelaksanaan tugas wewenang Pemerintah kota padang Panjang kepada Pemerintah tingkat atas, sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara legalitas formal, penyusunan dan penyampaian LKj IP ini adalah dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana mewajibkan setiap Kepala SKPD untuk menyampaikan kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, maka dalam laporan ini disajikan indikator-indikator yang ditetapkan di dalam penetapan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, terutama yang menyangkut dengan pelaksanaan kinerja Dinas pangan dan pertanian sebagaimana yang diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian penyusunan LKj IP ini kami sampaikan apresiasi yang tinggi dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi maksud dan bermanfaat adanya.

Padang Panjang, Januari 2020  
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian  
Kota Padang Panjang

**ADE NAFRITA ANAS, SP.,MP**

Pembina Tk. I, NIP. 19710520 199903 2 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini merupakan salah satu bentuk perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari dinas beserta kewenangannya. Berkenaan dengan itu, maka *Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang* mengacu kepada *Renstra Dinas Pangan dan Pertanian* tahun 2018-2023 yang dihimpun menjadi *RKPD* untuk kegiatan Tahun 2019, dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) untuk tahun 2019. Selanjutnya disusunlah Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2019 yang berisi sasaran dan indikator kinerja serta target yang ingin dicapai pada tahun 2020. Penetapan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2019 tersebut kemudian dijadikan dasar penyusunan LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.

Penetapan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Tahun 2019 berisikan sasaran dan indikator kinerja yang didukung oleh 6 program. Secara kuantitatif, kinerja kegiatan pada Tahun 2019 telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih dari semua pihak yang terkait sehingga Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga apa yang telah di kontribusikan tersebut menjadi amalan bagi kita, Amin.

## DAFTAR ISI

Halaman

	<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
	<b>IKHTISAR EKSKLUSIF</b>	<b>ii</b>
	<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
	C. Permasalahan Utama (Strategi Issued) yang Dihadapi Organisasi	7
	D. Struktur Organisasi	9
	E. Sumber Daya Manusia	11
	F. Maksud dan Tujuan	12
	G. Sistematika Penyusunan	13
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>14</b>
	A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian	14
	B. Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian	15
	C. Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2019	16
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>19</b>
	A. Capaian Kinerja Organisasi	19
	B. Realisasi Anggaran	27
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>34</b>
	A. Kesimpulan	34
	B. Saran	34

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan suatu kewajiban pemerintah termasuk Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini semata-mata tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk menganalisa kelemahan pelaksanaan kegiatan pemerintah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas pemerintah serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Terciptanya pemerintahan yang bersih serta mampu menyediakan “*Public Good and Service*” dengan menerapkan “*Good Governance*” dalam penyelenggaraannya merupakan pra-syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan. Agar menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat), dan supaya efektif diperlukan koordinasi yang baik dan terintegrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Kewajiban tersebut tentunya termasuk bagi pemerintah daerah beserta dengan perangkatnya, tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Berkaitan dengan itu, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagai salah satu perangkat daerah Kota Padang Panjang, juga diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) setiap tahunnya.

Memahami hal tersebut, maka dalam penyusunan LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2019 ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman sebagai payung hukumnya antara lain:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian.

## **B. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi**

Dinas Pangan dan Pertanian dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, telah ditetapkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pangan dan Pertanian adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

Uraian Tugas Kepala Dinas, sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra OPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, bidang ketahanan pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- e. menyusun dan menyelenggarakan program penyuluhan pertanian untuk pengembangan pembangunan pertanian;
- f. melakukan penataan prasarana dan pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. melakukan pengawasan peredaran sarana pertanian berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan;
- i. melakukan pengendalian dan menanggulangi hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. melakukan pengendalian dan menanggulangi bencana alam skala daerah;
- k. melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil panen di bidang pertanian;
- l. menyelenggarakan proses penerbitan izin usaha dan rekomendasi teknis di bidang pertanian;
- m. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- n. melaksanakan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian;
- o. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang pertanian;
- p. melaporkan kegiatan dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan pelaksana penyuluhan serta ketahanan pangan;



- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

### **3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :

- 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- 2. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

### **4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi dan pembibitan ternak;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana peternakan;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan hewan dan kesmavet; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Peternakan;
- b. Seksi Sarana, Prasarana Peternakan; dan
- c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).

## **5. Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perikanan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyuluhan pangan dan pertanian;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan tani; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan dan Pelaksanaan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan
- b. Seksi Kelembagaan Tani; dan
- c. Seksi Perikanan.

## **6. Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan keamanan pangan, distribusi dan harga pangan serta kewaspadaan dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. peningkatan sumber daya manusia di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- c. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
- c. Seksi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.

## **7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Puskeswan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan; dan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

## **8. UPTD Balai Benih Ikan**

UPTD Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana operasional Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pembibitan benih ikan, pengujian dan persiapan teknologi di lapangan, pemasaran benih ikan, penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi, pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta Pusat Pelatihan Pembenihan Ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembenihan benih ikan;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
- c. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pembenihan ikan;
- d. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi;

- e. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat agrowisata; dan
- f. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Balai Benih Ikan.

UPTD Balai Benih Ikan susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

#### **9. UPTD Rumah Potong Hewan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan; dan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Rumah Potong Hewan.

#### **10. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis, sarana dan prasarana Dinas Pangan dan Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis.

### **C. Permasalahan Utama (Strategic issued) yang dihadapi organisasi**

Permasalahan Utama (isu strategis) di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

#### **1. ASPEK TEKNIK**

- a. Fluktuasi produksi, populasi dan produktivitas pertanian;
- b. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/hewan;
- c. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat; dan
- d. Status kepemilikan lahan.

#### **2. ASPEK EKONOMIS**

- a. Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian;
- b. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
- c. Belum optimalnya pasar yang menampung hasil produksi pertanian; dan

- e. Peningkatan pendapatan petani.

### 3. ASPEK SOSIAL

- a. Lemahnya kelembagaan tani;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian;
- c. Tingginya upah tenaga kerja usaha tani, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain yang upah tenaga kerja lebih rendah;
- d. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
- e. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- f. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun; dan
- g. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian.

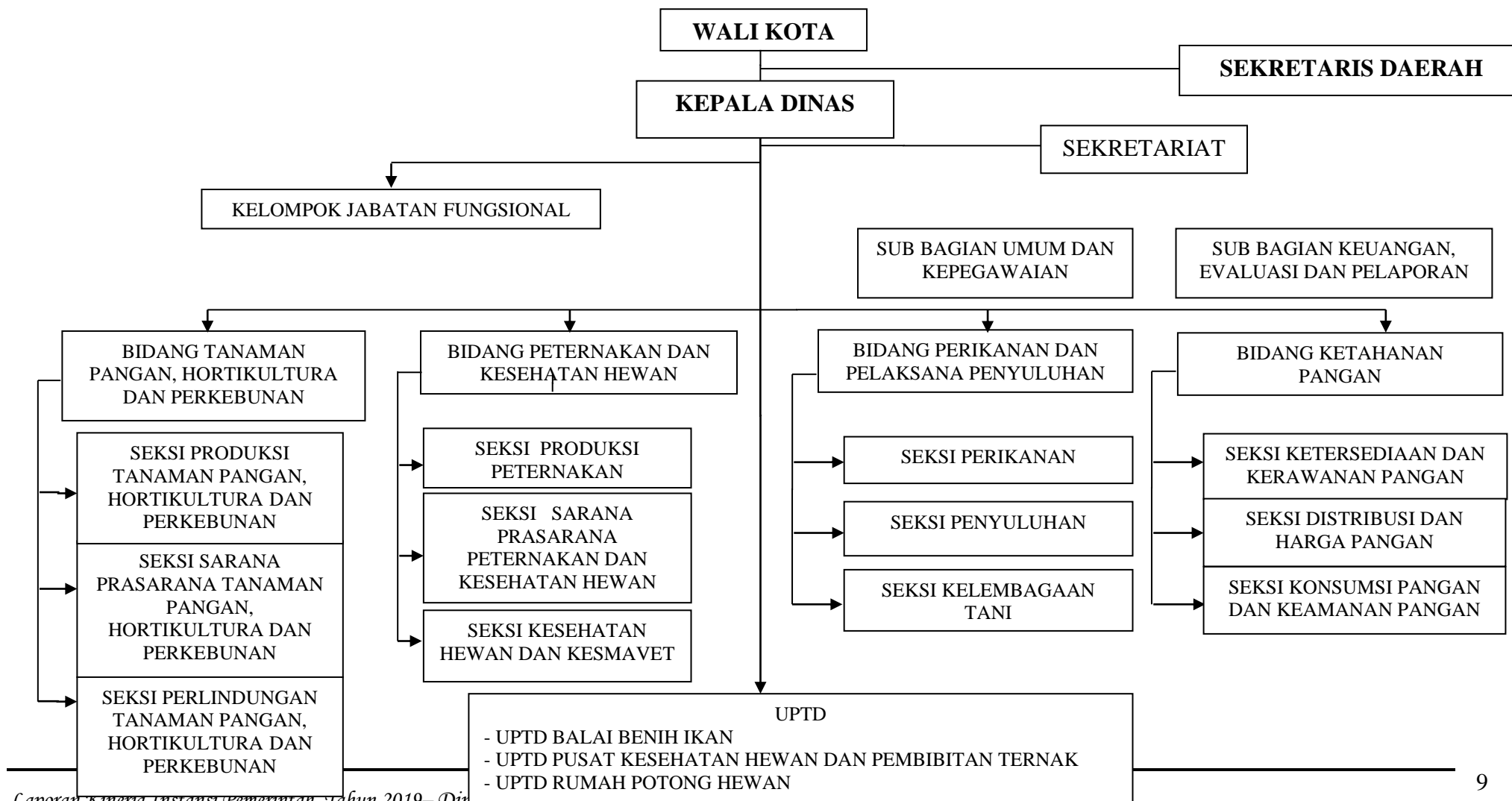
### 4. ASPEK EKOLOGIS

- a. Pengembangan teknologi belum sepenuhnya berwawasan lingkungan; dan
- b. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional.

#### D. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

##### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

<b>WALIKOTA PADANG PANJANG</b>	<b>: Fadly Amran, BBA</b>
<b>WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG</b>	<b>: Drs. Asrul</b>
<b>Plt. KEPALA DINAS</b>	<b>: Ir. MULYANSRI</b>
<b>BAGIAN SEKRETARIAT :</b>	
SEKRETARIS	: Ir. MULYANSRI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	: MUHAMMAD SURYA, SE
SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	: DEWI HERIYANTI IRMAN, SE
<b>BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN</b>	
KEPALA BIDANG	: FITRIADI. M, S.Pt
SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	: RAHMI, S.TP
SEKSI SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	: LIDDYA.R, SP
SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	: DESLIRIZALDI, SP. MP
<b>BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	
KEPALA BIDANG	: drh. WAHIDIN BERUH
SEKSI PRODUKSI PETERNAKAN	: Ir. NASRUL YAHYA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN	: SYAFNIATI, S.Pt
SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET	: BUSMAN, S.ST
<b>BIDANG PERIKANAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN :</b>	
KEPALA BIDANG	: INDRA, S.Pi
SEKSI PERIKANAN	: WILHELLIANA DIAN HANDAYANI, S.Pi
SEKSI PENYULUHAN	: RAHMI GUSTINI ARDI, S.Pt
SEKSI KELEMBAGAAN TANI	: JASRIL
<b>BIDANG KETAHANAN PANGAN :</b>	
KEPALA BIDANG	: ZETRIAL, S.Pi
SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	: NAZRUL
SEKSI DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN	: PRISJONI, SP
SEKSI KONSUMSI PANGAN DAN KEAMANAN PANGAN	: NELVIA ZULNI, S.TP

KEPALA UPTD RUMAH POTONG HEWAN

: Ir.RINALDI

KTU UPTD RUMAH POTONG HEWAN

: ZURNAWATI, SE.,MM

KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN

: drh. INDRA

KTU UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN

: NOFEBRIANTO, S.Sos

KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN

: SYAMSUWIR, S.Si

KTU UPTD BALAI BENIH IKAN

: NURLIANI

## E. Sumber Daya Manusia

### 2.2.1. Kepegawaian

Kondisi jumlah pegawai Dinas Pertanian Kota Padang panjang pada Tahun 2019 adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

No	Penempatan	Gol Ruang PNS				Pendidikan							Jenis Kelamin		Jml	
		I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D III	D IV	S1	S2	P	L	PNS	THL
1	Dinas Pangan dan Pertanian	-	5	24	10	1	1	16	1	1	40	2	30	32	39	23
2	UPTD BBI	-	-	3	-	-	-	8	1	-	2	-	2	9	3	8
3	UPTD Puskesmas	1	1	3	1	1	1	2	-	-	6	-	2	8	6	4
4	UPTD RPH	-	1	2	-	1	1	7	-	-	1	1	3	8	3	8
	Jumlah	1	7	32	11	3	3	33	2	1	49	3	37	57	51	43

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Berdasarkan data Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diatas jumlah PNS sebanyak 51 orang dan THL sebanyak 43 orang, dari jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kebutuhan pegawai masih kurang. Hal ini disebabkan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terdapat 3 UPTD yang langsung berurusan dengan pihak masyarakat. Kondisi saat ini masih ada kepala seksi pada masing-masing bidang yang belum mempunyai staf sehingga seluruh kegiatan hanya dikerjakan oleh kepala seksi yang bersangkutan.

### Kelembagaan Tani

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian, juga sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok organisasi petani sebagai pelaku usaha pertanian dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Jumlah Organisasi Petani

No	Organisasi Petani	Jumlah
1	Kelompok Tani	168
2	Gabungan Kelompok Tani	16

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang



Jumlah kelompok tani di Kota Padang Panjang sebanyak 168 terdiri dari 130 kelompok tani dan 38 kelompok perikanan serta gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) sebanyak 16 kelompok. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa kelompok yang kurang aktif.

#### **F. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja kelembagaan Pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagai pelaksana sebagian Urusan Pilihan di bidang Pangan, Pertanian serta Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2019.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Padang Panjang khususnya Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang guna melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LKj IP dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Urusan Pilihan pada Dinas Pangan dan Pertanian pada tahun berikutnya.
3. Untuk menyajikan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya tujuan LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyampaikan informasi dan laporan mengenai kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang selama Tahun 2019 sebagai konsekuensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Walikota Padang Panjang.
2. Sebagai bahan masukan dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan guna melakukan penyempurnaan format dan muatannya di masa datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun Anggaran 2019 ini merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Merupakan sarana bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP Dinas Pangan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018 mencakup aspek sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj IP Tahun 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2019.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj IP Tahun 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kota Padang Panjang bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

## **G. Sistematika Penyusunan**

LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **Pengantar**

### **Ikhtisar Eksekutif**

### **Daftar Isi**

<b>BAB I</b>	<b>:</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
		A. Dasar Pembentukan Organisasi
		B. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi
		C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi
		D. Struktur Organisasi
		E. Sumber Daya Manusia
		F. Sistematika Penyusunan
<b>BAB II</b>	<b>:</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>
		A. Tujuan
		B. Sasaran
		C. Penetapan Kinerja
<b>BAB III</b>	<b>:</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019</b>
		A. Capaian Kinerja Organisasi
		B. Realisasi Anggaran
<b>BAB IV</b>	<b>:</b>	<b>PENUTUP</b>
		A. Kesimpulan
		B. Saran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, maka telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2018 – 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul.

Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta capaiannya akan diuraikan pada bab ini.

#### **A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian**

Untuk mendukung Visi dan Misi Kota Padang Panjang, maka Dinas Pangan dan Pertanian telah merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut :

##### **Tujuan :**

1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan;
2. Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan; dan
3. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.

##### **Sasaran :**

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima bansos; dan
4. Meningkatnya Pendapatan Petani.

Dengan Berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Padang Panjang di atas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang selama periode 2018-2023 sebagaimana terlihat dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan dan Pertanian**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada				
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan		1. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	3,05	3,17	3,30	3,43	3,56
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan	85	85,25	85,5	85,75	86
		Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	1. Produksi Susu Sapi	396.000 liter/tahun	414.000 liter/tahun	432.000 liter/tahun	450.000 liter/tahun	468.000 liter/tahun
			2. Pendapatan Pembudidaya Ikan	17.222.000 rupiah/ tahun/ RTP	18.083.100 rupiah/ tahun/ RTP	18.987.255 rupiah/ tahun/ RTP	19.936.618 rupiah/ tahun/ RTP	20.933.449 rupiah/ tahun/ RTP
			3. Produksi Padi	6.634 ton	6.750 ton	6.983 ton	7216 ton	7.448 ton
			4. Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	5%	25%	50%	75%	100%
2.	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan		1. Angka Kemiskinan	5,45	5,03	4,6	4,18	3,75
			2. Indeks Gini	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24
		Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	2%	8%	10%	11%	12%
3.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		1. Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	10,29	10,31	10,34	10,36	10,39
		Meningkatnya Pendapatan Petani	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	10%	20%	30%	40%	50%

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

## **B. Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yang dalam konteks ini dimaksudkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang ingin dicapai dalam satu tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang difokuskan pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Berdasarkan proyeksi atau target yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, maka untuk mencapai tujuannya ditetapkan **SASARAN** sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana berikut ini :

Tujuan 1 : **Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan**

Sasaran 1 : Meningkatkan Ketahanan Pangan

Sasaran 2 : Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan

Tujuan 2 : **Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan**

Sasaran 3 : Meningkatkan Pendapatan Petani Penerima Bansos

Tujuan 3 : **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**

Sasaran 4 : Meningkatkan Pendapatan Petani

### **C. Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2019**

Sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang mencakup : 1) Bidang Pangan, 2) Bidang Pertanian, serta 3) Bidang Kelautan dan Perikanan, maka telah ditetapkan **6 (enam) program** yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada tahun anggaran 2019 sesuai dengan Penetapan Kinerja TA.2019, dimana program yang ditetapkan ini disinergikan dengan program kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dan dijabarkan dalam **23 (dua puluh tiga) kegiatan**, yaitu :

**Tabel 2.2 . Penetapan Kinerja Tahun 2019**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (indeks)	85,00	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	
				Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	45.575.000
				Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan dan Survey Pangan	7.025.000
				Penyusunan Sumber Pangan Alternatif	203.800.000
				Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	199.735.000
				Pemantauan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	10.612.500
				Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan	58.235.000
				Penanganan Daerah Rawan Pangan	27.374.800
				Analisis Ketersediaan Pangan	12.700.000
				Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	33.235.000
2.	Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan	* Produksi Susu Sapi (Liter/ Tahun)	39.600	<b>Program Produksi Hasil Peternakan</b>	
				Pembibitan dan Perawatan Ternak	813.009.000
				Pengembangan Agribisnis Peternakan	69.780.500
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan	546.090.000
				<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan</b>	
				Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	300.065.000
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)

1	2	3	4	5	6
		* Pendapatan Pembudidaya Ikan (rupiah/tahun/RTP)	17.222.000	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	
		* Produksi Padi (Ton)	6.634	Peningkatan dan Pengembangan Perikanan	114.500.000
				Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	65.930.000
				DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	400.409.000
				<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	
				Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	109.870.500
				Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	20.000.000
				Pemantauan Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan	138.850.000
				<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	
				DAK Bidang Pertanian	1.713.728.000
3.	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	* Persentase Terbentuknya Klater Tanaman Hias (%)	5	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	
				Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna	61.560.000
3.	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	* Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos (%)	2	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	
				Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	457.395.300
4.	Meningkatnya Pendapatan Petani	* Persentase Peningkatan Pendapatan Petani (%)	10	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	
				Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	74.599.800

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tahun 2019 ini, penilaian pencapaian kinerja telah dilakukan sampai pada tingkat indikator kinerja outcome.

Dari 10 program yang telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2019 terdapat 6 program yang menyangkut langsung dengan Tupoksi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja TA. 2019 yaitu :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Secara umum Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Sebanyak 6 program dengan 23 kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2019 untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Realisasi dari indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat dijabarkan seperti berikut :



## Sasaran 1: Meningkatnya Ketahanan Pangan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	80,20	94,35

Cara Pengukuran Indikator Sasaran:

- 1) % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/total energi kelompok pangan x 100
- 2) Skor AKE = % AKE x bobot
- 3) Skor PPH masing-masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE
- 4) Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan

Pencapaian skor PPH Kota Padang Panjang pada tahun 2019 sebesar 80,20 dengan persentase capaian sebesar 94,35. Nilai ini lebih rendah dibandingkan skor pada tahun 2018 yaitu sebesar 85 dan berada di bawah capaian propinsi Sumatera Barat (83) untuk tahun 2019.

**Tabel 3.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH Kota Padang Panjang)**

No.	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gr/Kap Hr	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			KKal/ Kap	%	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi- Padian	302,5	1.236	60,8	57,5	0,5	30,4	28,7	25,0	25,0
2	Umbi - umbian	35,5	31	1,5	1,4	0,5	0,8	0,7	2,5	0,7
3	Pangan Hewani	120,1	247	12,1	11,5	2,0	24,3	22,9	24,0	22,9
4	Minyak dan Lemak	29,7	267	13,1	12,4	0,5	6,6	6,2	5,0	5,0
5	Buah/ Biji Berminyak	6,2	33	1,6	1,5	0,5	0,8	0,8	1,0	0,8
6	Kacang- Kacangan	14,3	35	1,7	1,6	2,0	3,5	3,3	10,0	3,3
7	Gula	13,9	54	2,6	2,5	0,5	1,3	1,2	2,5	1,2
8	Sayur dan Buah	220,8	91	4,5	4,3	5,0	22,5	21,3	30,0	21,3
9	Lain- Lain	69,2	38	1,9	1,8	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>		<b>2.032</b>	<b>100,00</b>	<b>94,5</b>		<b>90,1</b>	<b>85,2</b>	<b>100,0</b>	<b>80,2</b>

Berdasarkan hasil pengolahan data susenas tahun 2018 di Kota Padang Panjang diperoleh bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) Aktual sebesar **80,2** (AKG 2.150 kkal/kap/hari) dengan persentase pencapaian Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 94,5%.

Konsumsi energi rata – rata perkapita perhari masyarakat Kota Padang Panjang adalah 2.032 kkalori/kapita/hari, sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE) ideal adalah 2.150 kkalori/kapita/hari. Data tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas rata – rata konsumsi energi perkapita perhari masyarakat Kota Padang Panjang masih rendah dari Angka Kecukupan Energi (AKE).

Untuk Angka kecukupan protein yang dianjurkan berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2013 adalah 57 gram/kapita/hari. Sedangkan konsumsi protein di Kota Padang Panjang sebesar 58,1 gram gram/kapita/hari. Konsumsi protein di Kota Padang Panjang sudah melebihi konsumsi protein yang dianjurkan. Konsumsi Protein meliputi protein nabati dan protein hewani, dimana sumber protein hewani yaitu kelompok pangan hewani dan protein nabati adalah kelompok pangan kacang – kacangan.

Berdasarkan olahan data skor PPH Kota Padang Panjang turun dari tahun sebelumnya, akan tetapi berdasarkan Departemen Kesehatan Tahun 1996, terdapat klasifikasi tingkat kecukupan energi dan protein :

- < 70 %            Defisit Tingkat Berat
- 70 % - 79 %    Defisit Tingkat Sedang
- 80 % - 89 %    Defisit Tingkat Ringan
- 90 % - 119 %   Normal
- ≥ 120 %        Berlebih

Berdasarkan tingkat kecukupan energi dan protein tersebut dapat dilihat bahwa di Kota Padang Panjang tingkat kecukupan energi berada pada kategori normal 94,5 % sedangkan untuk tingkat kecukupan protein juga berada pada ketegori normal 101,9 %.

Berdasarkan analisa terhadap skor PPH Kota Padang Panjang sebesar 80,20 menunjukkan bahwa masyarakat telah menerapkan pola **Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)** namun belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Untuk mengukur tingkat konsumsi pangan masyarakat per kelompok pangan ini dilakukan dengan mengukur AKE dan AKP.

Berdasarkan tingkat kecukupan energi dan protein di Kota Padang Panjang berada pada kategori normal 94,5% sedangkan untuk tingkat kecukupan protein juga berada pada kategori normal 101,9%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman** dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan 9 kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 598.292.300,-. Adapun 9 kegiatan tersebut antara lain :

1. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan dan Survey Pangan

3. Penyusunan Sumber Pangan Alternatif
4. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
5. Pemantauan Analisis Akses Harga Pangan Pokok
6. Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan
7. Penanganan Daerah Rawan Pangan
8. Analisis Ketersediaan Pangan
9. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Dalam rangka mencapai skor PPH yang ideal ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan, anantara lain :

1. Sosialisasi yang bertahap dan berkesinambungan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi beberapa kelompok pangan yakni umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah.
2. Pelatihan pemanfatkan pekarangan dengan menanam beragam buah dan sayur untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga.

Faktor penghambat pencapaian sasaran adalah:

1. Pola konsumsi karbohidrat, protein, sayuran dan buah pada masyarakat Padang Panjang belum seimbang.

## Sasaran 2: Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan

### • Produksi Susu Sapi

Hasil pengukuran capaian kinerja

sasaran meningkatkan produksi susu sapi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target (Liter)	Realisasi (Liter)	% Capaian
1.	Produksi Susu Sapi	396.000	396.720	100,18

Cara Pengukuran Indikator Sasaran Produksi Susu Sapi :

Jumlah produksi susu sapi/tahun

Pencapaian produksi susu sapi pada tahun 2019 sebesar 396.720 liter /per tahun dengan target awal 396.000 liter/per tahun dengan capaian sebesar 100,18%. Untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perkebunan dengan indikator produksi susu sapi** dilaksanakan melalui program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak dengan 4 kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 1.728.944.500,-.

Adapun 4 kegiatan tersebut antara lain :

1. Pembibitan dan Perawatan Ternak
2. Pengembangan Agribisnis Peternakan
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan
4. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Adanya peningkatan mutu genetik dan perbaikan budidaya sebahagian sapi-sapi yang ada di peternak disebabkan sapi-sapi tersebut berasal dari program Rearing Unit (Adanya peningkatan produktivitas produksi susu yang laktasi dari rata-rata dari sebelumnya 10 liter/ekor/hari menjadi 12 liter/ekor/hari).

- **Pendapatan Pembudidaya Ikan**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target (Rupiah/Tahun/RTP)	Realisasi (Rupiah/Tahun/RTP)	% Capaian
1.	Pendapatan Pembudidaya Ikan	17.222.000	20.187.640	117,22

Cara Pengukuran Indikator pendapatan pembudidaya ikan:

Jumlah produksi ikan kali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidya Ikan)

\* RTP = 712 orang

Jumlah produksi ikan di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, selain disebabkan jumlah panen ikan konsumsi yang meningkat juga adanya ikan masuk dari luar Kota Padang Panjang. Ikan masuk ini terdiri dari ikan air tawar ikan lele, ikan nila, dan ikan mas yang dibawa oleh pedagang dari luar Kota Padang Panjang untuk dijual ke pedagang eceran dalam Kota Padang Panjang. Kemudian adanya peningkatan permintaan benih dari pembudidaya Kota Padang Panjang untuk budidaya ikan lele dan ikan nila dalam pemanfaatan kolam ikan yang ada di halaman rumah mereka, sehingga adanya peningkatan produksi ikan konsumsi di Kota Padang Panjang.

Pendapatan pembudidaya ikan untuk tahun 2019 sebesar 20.187.640 Rupiah/Tahun/RTP, dimana jumlah produksi ikan sampai desember 2019 sebesar 716.680 dikali harga jual ikan Rp.20.000,- dibagi dengan jumlah RTP, melebihi target 117,22 %.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya produksi perikanan** dilaksanakan program Pengembangan Budidaya Perikanan dan 3 kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 580.839.000,-, 3 kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pengembangan Perikanan
2. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Mengalami peningkatan dimana masyarakat Kota Padang Panjang sudah banyak mengkonsumsi ikan
2. Produksi benih ikan terus bertambah.

#### • **Produksi Padi**

Hasil pengukuran capaian produksi padi untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Capaian
1.	Produksi Padi	6.634	9.810,6	147,88

Sumber data : Hasil pendampingan pengambilan sampel ubinan Dinas Pangan dan Pertanian dengan BPS Kota Padang Panjang karena angka tetap perhitungan produksi dan produktivitas baru akan dirilis BPS Juni 2020

Cara Pengukuran Indikator produksi padi: Jumlah Produksi Padi/Tahun

Capaian Persentase Produksi padi mencapai 147,88 % dari target 6.634 ton untuk tahun 2019. Hal ini terjadi karena berkurangnya serangan hama penyakit di tahun 2019 Untuk serangan hama tikus menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu dari 79,5 ha yang terkena serangan turun menjadi 25,05 ha dan serangan blast turun dari 6 ha menjadi 0,6 ha di tahun 2019 ini. Adapun cara untuk mengurangi serangan hama penyakit seperti tikus yang telah dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yakni mengajak masyarakat bersama-sama berburu tikus dan memberikan bantuan sarana penangkapan tikus seperti racun tikus.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Produksi Padi melalui 2 program dan 4 kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 1.982.448.500,-

**Adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:**

1. Program Ketahanan Pangan
  - a. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
  - b. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija
  - c. Pemantauan Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
  - a. DAK Bidang Pertanian

Faktor Keberhasilan sasaran, antara lain:

1. Perbaikan teknologi budidaya

- **Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias**

Hasil pengukuran capaian persentase terbentuknya klaster tanaman hias tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase terbentuknya klaster tanaman hias	5	5	100

Cara Pengukuran Indikator persentase terbentuknya klaster tanaman hias :

Progres tahapan pembentukan klaster tanaman hias

Capaian Persentase terbentuknya klaster tanaman hias untuk tahun 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 5% perencanaan pembuatan klaster tanaman hias. Pencapaian pembentukan klaster ini dalam rangka mewujudkan Padang Panjang sebagai Kota Bunga. Sebagai langkah awal untuk menumbuhkan dan mengembangkan tanaman hias di Kota Padang Panjang telah dibentuk suatu wadah Asosiasi Petani Tanaman Hias. Beberapa kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian pada tahun 2019 ini dilakukan untuk menambah pengetahuan kelompok tani dengan seperti studi banding ke daerah lain yang lebih maju. Ada beberapa tahapan pembentukan klaster tanaman hias, dimana ditargetkan pada tahun 2022 klaster tanaman hias telah terbentuk di Kota Padang Panjang.

Untuk mendukung pencapaian sasaran persentase terbentuknya klaster tanaman hias disediakan anggaran APBD 2019 dengan program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dengan kegiatannya penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna sebesar Rp.61.560.000,-

### Sasaran 3: Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	2	-	-

Cara Pengukuran Indikator Sasaran:

Selisih pendapatan petani setelah diberi bantuan dibagi sebelum diberi bantuan dikali 100

Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos tahun 2019 belum bisa diukur pada tahun yang bersangkutan karena manfaat dari bantuan sosial yang diterima belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Realisasi indikator ini baru bisa diukur pada tahun 2020.

Indikator kinerja ini didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 457.395.300,-, yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan Kegiatannya Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat.

Salah satu upaya Dinas Pangan dan Pertanian dalam memantau bantuan yang telah diberikan kepada petani yakni melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada petani sehingga permasalahan yang ditemui di lapangan dapat segera ditindak, seperti pengobatan terhadap ternak yang diserahkan.

### Sasaran 4: Meningkatnya Pendapatan Petani

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pendapatan Petani** dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	10	10	100

Cara Pengukuran Indikator Sasaran:

Biaya penjualan dikurangi biaya produksi dikali 100

Pencapaian persentase peningkatan pendapatan petani pada tahun 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 10%. Pendapatan petani diutamakan komoditinya padi dengan luas lahan sawah sebesar 630 Ha dan pendapatan awal sebesar Rp. 2.000.000/bulan. Indikator kinerja ini

didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 74.599.800,-, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan Kegiatannya Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani.

Adapun salah satu faktor pendukung keberhasilan capaian indikator pendampingan lapangan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dan perbaikan sarana serta prasarana pertanian, selain melalui APBD 2019, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian mendapatkan Alokasi Dana Tugas Perbantuan sebesar Rp.276.600.000,- berupa kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) seluas 50 Ha dan bantuan Alsintan Traktor roda dua sebanyak 1 unit.

## **B. Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran pada tiap-tiap sasaran perlu dilakukan analisis guna mendapatkan bahan dalam pengalokasian dana pada tahun berikutnya. Anggaran yang dilakukan analisis sebatas anggaran belanja langsung OPD, sedangkan belanja tidak langsung belum dapat dilakukan analisis. Anggaran dan realisasi pada tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:



**Tabel . Analisa Capaian Keuangan**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	80,20	Indeks	94,35	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>				
							Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	45.575.000	40.742.500	89,40	
							Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan dan Survey Pangan	7.025.000	6.197.500	88,22	
							Penyusunan Sumber Pangan Alternatif	203.800.000	190.855.350	93,65	
							Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	199.735.000	180.736.246	90,49	
							Pemantauan Analisis Akses Harga Pokok Pangan	10.612.500	9.505.250	89,57	
							Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan	58.235.000	47.574.500	81,69	
							Penanganan Daerah Rawan Pangan	27.374.800	25.505.000	93,17	
							Analisis Ketersediaan Pangan	12.700.000	11.649.500	91,73	
							Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	33.235.000	29.040.300	87,38	
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi Susu Sapi	396.000	396.720	Liter / Tahun	100,18	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>				
							Pembibitan dan Perawatan Ternak	813.009.000	671.659.453	82,61	
							Pengembangan Agribisnis Peternakan	69.780.500	64.306.750	92,16	
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan	546.090.000	444.977.000	81,48	
							<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan</b>				
							Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	300.065.000	258.912.100	86,29	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu	Triwulan IV		Ket
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pendapatan Pembudidaya Ikan	17.222.000	20.187.640.000	Rupiah/ Tahun/ RTP	117,22	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>				
							Peningkatan dan Pengembangan Perikanan	114.500.000	109.210.000	95,38	
							Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	65.930.000	60.380.550	91,58	
							DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	400.409.000	336.986.937	84,16	
		Produksi Padi	6.634	9.810,6	Ton	147,88	<b>Program Ketahanan Pangan</b>				
							Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	109.870.500	109.870.500	100	
							Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	20.000.000	7.434.250	37,17	
							Pemantauan Perumusan Kebijakan Pertanahan Pertanian dan Pedesaan	138.850.000	131.955.133	95,03	
							<b>Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>				
							DAK Bidang Pertanian	1.713.728.000	1.620.852.000	94,58	
3.	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	5	5	%	100	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>				
							Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna	61.560.000	56.341.370	91,52	
							<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>				
							Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	457.395.300	317.811.500	69,48	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu	Triwulan IV		Ket
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4..	Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	10	10	%	100	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>				
							Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	74.599.800	65.877.450	86,31	

### C. Capaian Program Dinas Pangan dan Pertanian

Dari 6 (enam) program yang terdapat pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019, masing-masing pencapaian realisasi program dirinci sebagai berikut:

#### 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Hasil pengukuran capaian **Program Peningkatan Ketahanan Pangan** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100	94,5	94,5
2.	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	100	101,9	101,9

Konsumsi energi rata-rata perkapita perhari masyarakat Kota Padang Panjang adalah 2.032 Kkalori/kapita/hari, sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE) ideal adalah 2.150 Kkalori/kapita/hari.

- Untuk Angka Kecukupan Protein yang dianjurkan berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2013 adalah 57 gram/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein di Kota Padang Panjang sebesar 58,1 gram/kapita/hari. Konsumsi Protein meliputi protein nabati dan protein hewani.

Dalam rangka mencapai target Angka Kecukupan Energi (AKE) perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi yang **Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)** terutama konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan.

#### 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Hasil pengukuran capaian **Program Pengembangan Budidaya Perikanan** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Capaian
1.	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	650	718,68	110,57

Nilai tersebut berasal dari hasil validasi satu data kelautan dan perikanan yang diolah melalui aplikasi [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id) milik Pusdatin KKP. Nilai Produksi ini diperoleh dari 9,98 Ha Kawasan Perikanan Kota Padang Panjang dan 712 RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan).

### 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Hasil pengukuran capaian **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	% Capaian
1.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1	1	100

Untuk pencapaian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan berjalan 100%, dimana tercapai keikutsertaan dalam kegiatan florikultura dan DAK Bidang Pertanian tercapai 100%.

### 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Hasil pengukuran capaian **Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Produksi Tanaman Hias	73.847 Tangkai	77.600 Tangkai	105,1
2.	Produktivitas Padi	5,7 Ton/Ha	6,1 Ton/Ha	107
3.	Luas Lahan Pertanian Organik	1 Ha	1 Ha	100

- Untuk data produksi tanaman hias diperoleh dari data statistik pertanian Dispangtan 2019.
- Untuk data produktivitas padi berdasarkan hasil yang diperoleh saat pendampingan ke Lapangan dengan BPS karena angka tetap baru dirilis Juni 2020.

- Capaian lahan organik Dinas Pangan dan Pertanian untuk keadaan tahun 2019 melebihi target yakni Lahan Pertanian Organik Kelompok Tani Kelok Lasung, Kelurahan Ganting.

#### 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Hasil pengukuran capaian **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/Hewan	5%	5,1%	102

Realisasi penurunan penyakit ternak/hewan pada tahun 2019 sebanyak 956 kasus berkurang dari tahun 2018 sebanyak 1021 penyakit. Adapun penurunan ini disebabkan oleh Monitoring dan Penangkapan HPR secara berkala yang dilakukan oleh petugas kesehatan hewan.

#### 6. Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan

Hasil pengukuran capaian **Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan/Produk Peternakan	5%	5,1%	102

Realisasi Tahun 2019 sebesar 5,1% dari tahun sebelumnya, dimana jumlah produksi berjalan dibagi jumlah produksi peternakan tahun lalu dikali 100%.  $\text{Produksi daging } (813.061-773.520) / 773.520 \text{ Kg} \times 100 = 5,1 \%$

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan dan analisa terhadap pelaksanaan kinerja tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penyampaian LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang merupakan salah satu pemenuhan kewajiban Laporan Pemerintah Daerah sekaligus dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyusunan LKj IP ini masih mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, khususnya terhadap kinerja tahun 2019.
3. Dalam LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini telah dianalisis sebanyak 4 sasaran. Secara umum capaian kinerja tahun 2019 telah dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai indikator tingkat capaian kinerja output dan outcome.

#### **B. SARAN/ REKOMENDASI**

Berdasarkan gambaran kinerja yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk tahun 2019, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan dukungan dari pihak legislatif dan instansi terkait agar Program Pembangunan Pertanian yang ditargetkan dalam Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah guna tercapainya visi dan misi.
2. Penyusunan program dan kegiatan agar merujuk pada sasaran visi dan misi yang telah ditetapkan guna pencapaian indikator kinerja yang lebih baik.
3. Diperlukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan setiap kegiatan.